

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS NOMOR 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR)**

TESIS

Oleh

**PURWANTO
2002190083**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS NOMOR 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

**PURWANTO
2002190083**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

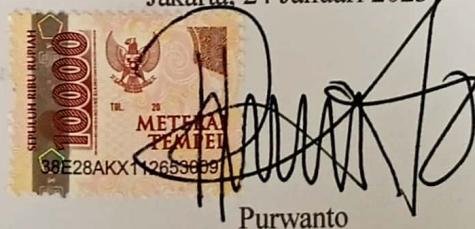
Nama : Purwanto
NIM : 2002190083
Program Studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul “PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS NOMOR 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR)” adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tesis saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah diduplikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalua terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 24 Januari 2023


Purwanto



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI
KASUS NOMOR 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR)

Oleh :

Nama : Purwanto
NIM : 2002190083
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta 24 Januari 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi , S.H., M.H.
NIP/NIDK : 191632/0302117904

Dr.Djernin Sitanggang,Bc,IP.,S.H.,M.H.
NIP/NIDK : 160658/9903262820

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDK : 141104/0327096504



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDK : 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 24 Januari 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Univeritas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Purwanto
NIM : 2002190083
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul

“PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS NOMOR 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR)”

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji

Jabatan Dalam Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Sebagai Ketua

2. Dr. Djernih Sitanggang, Bc,IP., S.H., M.H. Sebagai Anggota

3. Dr. Arminanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H. Sebagai Anggota

Jakarta 24 Januari 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Purwanto
NIM : 2002190083
Program Studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan Intelektual akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 24 Januari 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta diberi kesempatan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR”** Penyusunan Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Dalam hal banyak keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit petunjuk, bantuan, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H. selaku Dosen Penguji dalam tesis ini, yang memberikan semangat dan masukan dalam pembuatan tesis ini.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf serta Karyawan Program Studi Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Orang Tua dan Mertua Terkasih, serta seluruh keluarga terima kasih atas dukungan doanya, materil, moril serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Istri Tercinta Penulis dr. Diah Ayu Lestari terima kasih atas dukungan doa, materil, moril serta semangat yang selalu ada sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
11. Teman-teman serta sahabat di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata, penulis sampaikan segala bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis tidak bisa terbalaskan hanya Tuhan Yang Maha Esa yang memberi kelimpahan dan akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kepada pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana, apabila ada kekurangan atau kelemahan dalam penulisan tesis ini, kiranya dapat diberi kritik dan saran demi penyempurnaan tesis ini.

Jakarta, 24 Januari 2023

**PURWANTO
NIM. 2002190083**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	8
1. 3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Maksud.....	8
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	9
1. 4 Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1.4.1 Kerangka Teori.....	10
1.4.2 Kerangka Konsep.....	23
1. 5 Metode Penelitian.....	28
1.5.1 Jenis Penelitian.....	28
1.5.2 Bahan Penelitian.....	29
1.5.3 Tehnik Pengolahan Data.....	29
1.5.4 Tahap Penelitian.....	31

1.5.5 Metode Analisis Data.....	31
1. 6 Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
2. 1 Pelaksanaan Pidana.....	35
2. 2 Tindak Pidana Narkotika.....	43
2.2.1 Pengertian Narkotika.....	43
2.2.2 Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	47
2.2.3 Sanksi Pidana mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	50
2. 3 Hukuman Mati Terhadap Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia...52	
2.3.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	52
2.3.2 Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	53
2.3.3 Hak Asasi Manusia Internasional.....	54
2.3.4 Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba dari Aspek Hak Manusia.....	57
2. 4 Kepastian Hukum Pada Pelaksanaan Hukuman Mati.....	59
BAB III KEYAKINAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN DALAM PUTUSAN 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.....	66
3. 1 Dasar Hukum Pemberian Hukuman Mati.....	66
3.1.1 Undang-Undang Dasar 1945.....	66
3.1.2 Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	67
3.1.3 Undang-Undang Narkotika.....	73
3. 2 Peraturan Pidana Mati Dalam Hukum Positif.....	76
3.2.1 Pidana Mati Dalam KUHP.....	76
3.2.2 Pidana Mati diluar KUHP.....	79
3.2.3 Pidana Mati dalam Pembaruan KUHP 2019.....	83

3. 3 Hal Yang Meringankan dan Memberatkan dalam Hukum Pidana.....	88
3.3.1 Hal Yang Meringankan.....	88
3.3.2 Hal Yang Memberatkan.....	90
BAB IV PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM STUDI KASUS NOMOR 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR.....	93
4. 1 Kasus Posisi Perkara Terdakwa.....	93
4.1.1 Identitas Terdakwa.....	93
4.1.2 Kasus Posisi.....	94
4.1.3 Dakwaan dan Tuntutan.....	97
4.1.4 Tuntutan Jaksa Penuntun Umum.....	106
4.1.5 Putusan Pengadilan.....	106
4. 2 Analisis Yuridis Pidana Mati.....	109
4. 3 Analisis Dakwaan.....	111
4. 4 Analisis Tuntutan.....	112
4. 5 Analisis Putusan.....	113
4. 6 Analisis Kepastian Hukum Pada Eksekusi Pidana Mati.....	115
BAB V PENUTUP.....	120
5. 1 Kesimpulan.....	120
5. 2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pengaturan pidana mati dalam kitab undang-undang hukum pidana termuat dalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok, sanksi pidana mati sebagai pidana pokok yang berada di urutan paling atas yang berarti pidana mati sebagai hukuman atau sanksi paling berat dalam sistem KUHP. Pedoman penerapan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam KUHP yakni alternative. Hakim dapat memilih salah satu sanksi atau hukuman diantara jenis hukuman yang dijatuhkan. Namun pada pelaksanaan eksekusi pidana mati seharusnya memiliki kepastian hukum sehingga terdakwa tidak merasakan dua kali penghukuman pada diri terdakwa dan tidak merasakan ketakutan dan begitu juga dengan keluarga yang di tinggalkan dimana begitu sedih melihat terdakwa tidak ada kepastian padahal dalam asas hukum pidana di Indonesia yaitu asas legalitas yang dimana dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu maka pada kasus terdakwa Fredi Budiman sebenarnya merupakan hal yang meringankan suapaya tidak dijadikan hukuman pidana mati dikarenakan telah menunggu selama 3 (tiga) tahun. adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Pertama, bagaimana hal-hal yang meyakinkan hakim memberikan vonis hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan asas keadilan dalam perkara kasus nomor 2267/pid.sus/2012/pn.jkt.bar? Kedua, bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ? dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif

Kata Kunci : Pidana Mati, Eksekusi Pidana Mati, Narkotika.

ABSTRACT

The regulation on capital punishment in the penal code is contained in Article 10 of the Criminal Code as the main punishment, the death penalty as the main punishment which is at the very top, which means death penalty as the most severe punishment or sanction in the Criminal Code system. Implementation guidelines for judges in imposing capital punishment in the Criminal Code, namely alternative. The judge can choose one of the sanctions or punishments among the types of punishments imposed. However, in the implementation of death penalty executions, they should have legal certainty so that the defendant does not feel twice the punishment on the defendant and does not feel fear and so does the family left behind where it is so sad to see the defendant have no certainty even though in the principles of criminal law in Indonesia, namely the principle of legality which in Latin is known as Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali which means that more or less there is no offense, there is no crime without prior regulation, so in the case of the defendant Fredi Budiman it is actually a mitigating factor so that the death penalty is not made because it has been waiting for 3 (three) years. As for the formulation of the problem, namely First, how are the things that convince the judge to give a death sentence to the perpetrators of narcotics crimes based on the principle of justice in case number 2267/pid.sus/2012/pn.jkt.bar? Second, how is the application of the principle of legal certainty in the execution of narcotics offenders? and using normative juridical research methods

Kata Kunci : Death Penalty, Death Penalty Execution, Narcotics.